DETEKSI DAN CEGAH DINI POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KOMUNITAS TOLOTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Chairul Madda
NPP. 33.1007
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: acm.01890@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, SH., MH.
Email: muhammad@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Potential social conflict in plural communities needs to be anticipated early so that social vulnerability does not develop into a wider disturbance of public peace and order. The Tolotang community in Sidenreng Rappang Regency represents a local belief community administratively associated with Hindu identity and living side by side with a Muslim majority. This condition creates a need for a systematic early detection and prevention mechanism, particularly through local government coordination within the framework of public peace and order (Trantibum).* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the implementation of early detection and prevention of potential social conflict in the Tolotang community by the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency within the framework of Trantibum.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method using the Conflict Early Warning System (CEWS) theory of Tim Sweijs and Joris Teer as the analytical framework. Data were collected through semi-structured interviews, observation, documentation, and triangulation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana.* ***Result:*** *The findings show that early detection and prevention have been implemented through early warning mechanisms and cross-sectoral coordination across social, political, and economic dimensions. The social dimension is reflected in relatively harmonious intergroup relations, low open discrimination, and inclusive public services. The political dimension is reflected in inter-agency coordination, policy support, involvement of customary and religious leaders, and communication between the government and the Tolotang community. The economic dimension is reflected in the absence of significant economic disparities, the existence of local economic potential, and the identification of limited human resources as a vulnerability that needs to be anticipated.* ***Conclusion:*** *The implementation of early detection and prevention has been carried out, but it still requires institutional strengthening, better human resource capacity, and more systematic management of social vulnerability. Strengthening cross-sectoral coordination, reinforcing the Regional Early Warning Team, establishing the Community Early Warning Forum, and improving local institutional capacity are needed to make the system more sustainable.*
Keywords: *Early Detection; Early Prevention; Social Conflict; Tolotang Community; Public Peace and Order (Trantibum).*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Potensi konflik sosial dalam masyarakat majemuk perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat. Komunitas Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kelompok

kepercayaan lokal yang secara administratif banyak tercatat sebagai pemeluk Hindu dan hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas Muslim. Kondisi tersebut menuntut adanya pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang sistematis oleh pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kerangka penyelenggaraan Trantibum. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori *Conflict Early Warning System* (CEWS) dari Tim Sweijs dan Joris Teer sebagai kerangka analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan triangulasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dan cegah dini telah berjalan melalui mekanisme kewaspadaan dini dan koordinasi lintas sektor pada dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Pada dimensi sosial, pelaksanaan ditandai oleh hubungan antarkelompok yang relatif harmonis, rendahnya diskriminasi terbuka, dan akses layanan publik yang relatif inklusif. Pada dimensi politik, pelaksanaan ditandai oleh koordinasi antarlembaga, dukungan kebijakan kewaspadaan dini, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama, serta komunikasi pemerintah dengan komunitas Tolotang. Pada dimensi ekonomi, pelaksanaan ditandai oleh tidak adanya kesenjangan ekonomi yang mencolok, adanya potensi ekonomi lokal, dan teridentifikasinya keterbatasan sumber daya manusia sebagai kerentanan yang perlu diantisipasi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang telah berjalan, namun belum didukung secara optimal oleh kelembagaan kewaspadaan dini, kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan kerentanan sosial yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Kata kunci: Deteksi Dini; Cegah Dini; Konflik Sosial; Komunitas Tolotang; Trantibum.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik sosial merupakan salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dapat mengganggu stabilitas sosial, ketenteraman masyarakat, dan keberlangsungan pembangunan. Dalam masyarakat majemuk, perbedaan identitas sosial, agama, budaya, dan kepentingan dapat menjadi sumber kerentanan apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melaksanakan deteksi dan cegah dini sebagai bagian dari kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial (Soekanto, 2006).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui sistem kewaspadaan dini. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pemerintahan memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan stabilitas masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Labolo, 2014). Implementasi deteksi dan cegah dini konflik sosial dilakukan melalui koordinasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Secara regulatif, pencegahan konflik sosial memperoleh landasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya deteksi dini, cegah dini, pengelolaan informasi potensi konflik, dan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan konflik sosial. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan

kewaspadaan dini tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum).

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan karakter sosial yang plural. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebanyak 334.578 jiwa, terdiri atas 165.558 laki-laki dan 169.020 perempuan. Mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 305.222 jiwa, sedangkan pemeluk Hindu tercatat sebanyak 28.259 jiwa. Kecamatan Tellu Limpoe sebagai lokus penelitian memiliki 26.780 penduduk, dengan 16.285 penduduk beragama Islam dan 10.485 penduduk beragama Hindu. Komposisi ini menunjukkan adanya pluralitas agama dan kepercayaan yang menonjol.

Komunitas Tolotang menjadi salah satu ciri sosial khas di Kecamatan Tellu Limpoe, khususnya Kelurahan Amparita. Komunitas ini memiliki kekhasan kepercayaan dan tradisi lokal, serta hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas Muslim dalam ruang sosial yang sama. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa komunitas Tolotang perlu dilihat secara hati-hati karena terdapat potensi salah persepsi identitas, hambatan komunikasi, dan keterbatasan akses yang dapat menjadi kerentanan sosial apabila tidak dikelola (Kusmana et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan kerangka *Conflict Early Warning System* (CEWS) untuk melihat pelaksanaan deteksi dan cegah dini melalui dimensi sosial, politik, dan ekonomi (Sweijs et al., 2022). Ketiga dimensi tersebut penting karena konflik sosial tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi antarkelompok, tetapi juga oleh koordinasi kebijakan, legitimasi kelembagaan, representasi aktor lokal, akses terhadap layanan publik, kapasitas sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang dalam kerangka Trantibum.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research GAP*)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang membahas pelaksanaan kelembagaan formal pemerintah daerah dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial pada komunitas kepercayaan lokal. Kajian tentang komunitas Tolotang cenderung lebih banyak membahas aspek sosial-budaya, kearifan lokal, identitas, dan relasi masyarakat, sedangkan pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah dalam kerangka Trantibum belum banyak dikaji secara mendalam (Syukur, 2021).

Secara empiris, komunitas Tolotang hidup dalam kondisi sosial yang relatif harmonis. Akan tetapi, tetap terdapat potensi kerentanan berupa salah persepsi identitas, bias administratif, isu atau konten sensitif, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketergantungan pada figur tokoh tertentu dalam komunikasi sosial. Kerentanan tersebut tidak selalu berkembang menjadi konflik terbuka, tetapi dalam kerangka CEWS tetap perlu dipantau sebagai gejala awal yang dapat memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak ditangani secara tepat.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi deteksi dan cegah dini konflik sosial pada komunitas Tolotang sebagai dasar perumusan kebijakan kewaspadaan dini konflik sosial oleh pemerintah daerah. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah berpotensi mengalami keterbatasan data dan informasi dalam memahami pola kerawanan sosial pada komunitas lokal sehingga upaya pencegahan konflik sosial dapat menjadi kurang optimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan deteksi dini konflik sosial, kewaspadaan dini, koordinasi kelembagaan, serta dinamika konflik berbasis identitas.

Deteksi dan cegah dini konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dan menemukan bahwa koordinasi lintas sektor berjalan efektif, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas deteksi dan cegah dini konflik sosial berbasis agama, tetapi berbeda pada konteks komunitas Tolotang sebagai komunitas kepercayaan lokal (Lestari, 2025).

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan potensi konflik di Provinsi Riau. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sosial. Penelitian ini mengembangkan perspektif tersebut pada level komunitas lokal dan menempatkan Trantibum sebagai kerangka pelaksanaan pencegahan konflik (Fahmi et al., 2022).

Model *Early Warning System* berbasis komunikasi untuk kasus ujaran kebencian berbasis etnis di media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas aktor dan dukungan komunikasi adaptif. Relevansinya terletak pada kebutuhan deteksi dini terhadap isu sensitif yang dapat berkembang menjadi potensi konflik (Sarasati et al., 2025).
Sistem deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan pentingnya pemetaan potensi konflik, penguatan aktor lokal, dan partisipasi masyarakat (Samudro et al., 2024).

Model deteksi dini intensi konflik sosial di komunitas perkotaan dan menegaskan bahwa stereotip dan identitas sosial dapat membentuk prasangka yang meningkatkan intensi konflik sosial (Suyono & Lismawati, 2024).

Kelima penelitian tersebut menjadi pijakan bagi penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa kajian khusus mengenai pelaksanaan deteksi dan cegah dini pada komunitas Tolotang dalam kerangka Trantibum masih perlu dikembangkan .

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada fokus, lokus, teori, dan konteks analisis. Dari sisi fokus, penelitian ini tidak hanya membahas konflik sosial secara umum, tetapi secara khusus menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang sebagai komunitas kepercayaan lokal. Dari sisi lokus, penelitian ini mengambil Kecamatan Tellu Limpoe, khususnya Kelurahan Amparita, sebagai ruang sosial utama komunitas Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan *Conflict Early Warning System* (CEWS) dari Tim Sweijs dan Joris Teer, yang dioperasionalkan ke dalam dimensi sosial, politik, dan ekonomi sesuai konteks lokal. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan teori peran, CEWERs, komunikasi akomodasi, teori konflik, atau teori identitas sosial secara mandiri. Dari sisi konteks, penelitian ini mengaitkan pelaksanaan CEWS dengan penyelenggaraan Trantibum, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tata kelola pemerintahan daerah dalam pencegahan konflik sosial berbasis komunitas lokal.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kerangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami proses, makna, pengalaman aktor, pola koordinasi, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang (Creswell, 1994). Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam serta menganalisis implementasi fungsi pemerintahan dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial di masyarakat (Nawawi, 2013).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, Satpol PP, FKUB, TNI, Polri, tokoh adat komunitas Tolotang, tokoh agama Islam, dan masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, regulasi, data kependudukan, dokumentasi kegiatan, publikasi ilmiah, dan sumber lain yang relevan (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan deteksi dan cegah dini, faktor pendukung dan penghambat, serta pola sinergi antarlembaga; observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial di lapangan; dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi (Sugiyono, 2013).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis utama menggunakan teori CEWS dengan tiga dimensi, yaitu sosial, politik, dan ekonomi, sesuai dengan operasionalisasi konsep penelitian (Miles et al., 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang menggunakan teori *Conflict Early Warning System* (CEWS) dari Tim Sweijs dan Joris Teer. Analisis diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu sosial, politik, dan ekonomi, karena ketiganya dapat menggambarkan gejala awal kerawanan sosial, kapasitas kebijakan, dan kondisi struktural masyarakat (Sweijs et al., 2022). Adapun pembahasan disajikan dalam subbab berikut.

Untuk memperjelas data dasar lokasi penelitian, berikut disajikan data kependudukan dan data agama/kepercayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi konteks penting dalam membaca pluralitas sosial masyarakat.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah Penduduk (Jiwa)	%
1	Panca Lautang	9.565	2,86	9.675	2,89	19.240	5,75
2	Tellu Limpoe	13.157	3,93	13.623	4,07	26.780	8,00
3	Wattang Pulu	19.899	5,95	19.886	5,94	39.785	11,89
4	Baranti	16.558	4,95	17.164	5,13	33.722	10,08
5	Panca Rijang	16.442	4,91	17.023	5,09	33.465	10,00
6	Kulo	7.204	2,15	7.313	2,19	14.517	4,34
7	Maritengngae	27.584	8,24	28.817	8,61	56.401	16,86
8	Wattang Sidenreng	10.511	3,14	10.572	3,16	21.083	6,30

9	Dua Pitue	16.280	4,87	16.897	5,05	33.177	9,92
10	Pitu Riawa	15.865	4,74	15.891	4,75	31.756	9,49
11	Pitu Riase	12.493	3,73	12.159	3,63	24.652	7,37
	Jumlah	**165.558**	**49,48**	**169.020**	**50,52**	**334.578**	**100,00**

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Semester I 2025.

Berdasarkan data Profil Kependudukan Semester I Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebanyak 334.578 jiwa, yang terdiri dari 165.558 laki-laki (49,48%) dan 169.020 perempuan (50,52%). Penduduk tersebut tersebar di 11 kecamatan dengan distribusi jumlah penduduk yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Salah satu kecamatan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Tellu Limpoe memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.780 jiwa yang terdiri dari 13.157 laki-laki dan 13.623 perempuan atau sekitar 8,00% dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Islam	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	Kepercayaan
1	Panca Lautang	19.052	1	43	-	-	-
2	Tellu Limpoe	16.285	-	10.485	-	-	-
3	Watang Pulu	32.029	30	7.545	5	-	-
4	Baranti	33.430	18	254	-	-	-
5	Panca Rijang	33.366	16	48	-	-	-
6	Kulo	14.436	15	3	-	-	-
7	Maritengngae	54.230	86	1.836	-	-	1
8	Watang Sidenreng	17.256	8	3.680	-	-	-
9	Dua Pitue	31.394	25	1.735	5	-	-
10	Pitu Riawa	29.399	9	2.340	-	-	-
11	Pitu Riase	24.345	4	290	-	-	-
	Jumlah	**305.222**	**212**	**28.259**	**10**	**-**	**1**

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025, mayoritas penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang menganut agama Islam dengan jumlah 305.222 jiwa. Selain itu terdapat pemeluk agama lain seperti Katolik sebanyak 212 jiwa, Hindu sebanyak 28.259 jiwa, serta Buddha sebanyak 10 jiwa, sementara pemeluk aliran kepercayaan tercatat sebanyak 1 jiwa.

Tellu Limpoe yang memiliki 16.285 penduduk beragama Islam dan 10.485 penduduk beragama Hindu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralitas agama dan kepercayaan dalam masyarakat yang hidup berdampingan di wilayah tersebut. Komunitas Tolotang yang secara administratif banyak tercatat dalam kategori pemeluk agama Hindu merupakan fenomena sosial yang khas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.1 Dimensi Sosial

Dimensi sosial berkaitan dengan hubungan antarkelompok, potensi diskriminasi, dan akses layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas interaksi antara

komunitas Tolotang dan masyarakat Muslim di Kecamatan Tellu Limpoe, khususnya Kelurahan Amparita, berlangsung cukup baik dan relatif harmonis. Interaksi tersebut terlihat dalam hubungan sosial sehari-hari, kegiatan gotong royong, hubungan kekeluargaan, kegiatan adat, kegiatan keagamaan, serta komunikasi antartokoh masyarakat. Kondisi ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung deteksi dan cegah dini. Temuan ini menunjukkan bahwa kohesi sosial masih terpelihara melalui hubungan bertetangga, gotong royong, interaksi adat, serta ruang komunikasi sosial sehari-hari (Putnam, 1993).

Data interaksi sosial berikut memperlihatkan bentuk-bentuk relasi sehari-hari antara komunitas Tolotang dan masyarakat sekitar di Kelurahan Amparita.

Tabel 3.
Bentuk Interaksi Sosial di Kelurahan Amparita

No.	Bentuk interaksi sosial	Temuan
1	Hubungan antar tetangga	Masyarakat Tolotang dan Muslim hidup berdampingan tanpa sekat sosial yang tegas
2	Gotong royong	Interaksi antarkelompok tampak dalam kegiatan gotong royong dan aktivitas sosial kampung
3	Kegiatan keluarga	Hubungan kekeluargaan menjadi penguat kohesi sosial di masyarakat
4	Aktivitas pasar	Interaksi sosial juga berlangsung dalam aktivitas pasar dan ruang ekonomi sehari-hari
5	Kegiatan adat dan keagamaan	Interaksi tetap terjalin dalam kegiatan adat maupun kegiatan keagamaan
6	Komunikasi antartokoh	Komunikasi sosial berlangsung intens dan membantu menjaga keharmonisan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Pada indikator potensi diskriminasi, penelitian menemukan bahwa diskriminasi terbuka terhadap komunitas Tolotang berada pada tingkat relatif rendah. Tidak ditemukan diskriminasi sistemik yang menonjol dalam relasi sosial maupun pelayanan publik. Meski demikian, terdapat gejala yang tetap perlu diantisipasi, seperti salah persepsi identitas, bias administratif, dan gesekan kecil yang dapat muncul apabila isu sensitif tidak segera dimediasi. Dalam kerangka CEWS, gejala kecil semacam ini perlu dipahami sebagai sinyal awal yang membutuhkan respons cepat dan tepat.

Pada indikator akses layanan publik, penelitian menunjukkan bahwa komunitas Tolotang memperoleh akses layanan publik yang relatif inklusif. Pemerintah daerah dan perangkat terkait berupaya menjaga pelayanan agar tidak memunculkan ketersinggungan atau kesan perlakuan berbeda. Dengan demikian, dimensi sosial menunjukkan bahwa kondisi hubungan masyarakat relatif kondusif, tetapi tetap memerlukan pemantauan berkelanjutan melalui komunikasi sosial, penguatan dialog, dan pelibatan tokoh lokal.

3.2 Dimensi Politik

Dimensi politik dalam penelitian ini berkaitan dengan koordinasi antarlembaga, dukungan kebijakan kewaspadaan dini, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama, serta mekanisme komunikasi pemerintah dengan komunitas Tolotang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dan cegah dini di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui koordinasi lintas aktor, terutama Bakesbangpol, Satpol PP, TNI/Polri, FKUB, KUA, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Bakesbangpol berperan sebagai

penghimpun dan pengoordinasi informasi, sedangkan unsur keamanan dan Trantibum mendukung pembacaan situasi lapangan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

Pada dimensi politik, penguatan kerukunan juga didukung oleh program Pembangunan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama (PDSKUB) dan SIPAKATABE sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.
Kegiatan SIPAKATABE

No	Program	Tujuan	Target	Waktu	Hasil
1	PDSKUB Amparita	Mewujudkan toleransi, kerukunan, harmoni, dan moderasi beragama	Masyarakat Kelurahan Amparita	2022	Penetapan Amparita sebagai lokasi program kerukunan
2	Pendampingan kader penggerak	Membentuk komitmen dan internalisasi kerukunan umat beragama	Kader penggerak di Amparita	2022	Penguatan kapasitas kader penggerak
3	Inisiasi SIPAKATABE	Menyediakan media informasi dan dokumentasi kerukunan	Masyarakat dan pelaksana program	2022	Website/aplikasi SIPAKATABE
4	Dokumentasi KUB	Mempublikasikan praktik baik kerukunan umat beragama	Remaja dan pemuda Amparita	2022	Tulisan feature, video singkat, dan publikasi
5	Visitasi dan monitoring	Meninjau kesiapan pelaksanaan program PDSKUB	Tim fasilitator, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat	2022	Penguatan koordinasi dan evaluasi kesiapan program
6	Kunjungan ke Rumah Adat Tolotang dan Masjid Ar-Rahmah	Memperkuat silaturahmi dan melihat langsung praktik kerukunan	Masyarakat Muslim dan Hindu Tolotang	2022	Dialog lapangan dan penguatan pemahaman kerukunan
7	Pembinaan moderasi beragama	Memperkuat komitmen kerukunan dan nilai kebersamaan	FKUB, Forkopemda, operator madrasah, unsur Kemenag	2024	Penguatan pemahaman moderasi beragama
8	Kemah Pemuda Kerukunan Antar Umat Beragama	Mempererat silaturahmi dan toleransi antarpemuda lintas agama	Pemuda lintas agama	2024	Keakraban pemuda, pentas seni kerukunan, dan penguatan toleransi

Sumber: SIPAKATABE Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026.

Dukungan kebijakan kewaspadaan dini juga menjadi unsur penting. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini memperoleh landasan dari berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik. Keberadaan dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menghimpun informasi, melakukan analisis kerawanan, dan menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tokoh adat dan tokoh agama memiliki posisi penting dalam komunikasi, mediasi, dan pencegahan. Dalam komunitas Tolotang, figur *Wa'* atau *Uwak* memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga menjadi penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan tokoh agama, FKUB, dan KUA juga mendukung dialog lintas kelompok, penyuluhan moderasi beragama, pembinaan sosial-keagamaan, serta penguatan kerukunan, sejalan dengan pendekatan manajemen konflik yang menekankan mediasi, kolaborasi, dan penyelesaian secara konstruktif (Rahim, 2001). Salah satu bentuk kegiatan yang mendukung komunikasi sosial adalah SIPAKATABE, pembinaan moderasi beragama, kunjungan ke rumah adat Tolotang dan masjid, serta kemah pemuda kerukunan antarumat beragama.

Mekanisme komunikasi pemerintah dengan komunitas Tolotang berjalan melalui forum formal maupun komunikasi informal. Keterbukaan komunikasi ini memudahkan pemerintah daerah mengetahui isu atau gejala sosial lebih awal. Apabila muncul isu sensitif, pemerintah dapat segera melakukan klarifikasi kepada tokoh komunitas sehingga potensi salah persepsi dapat diredam. Dengan demikian, dimensi politik menunjukkan bahwa deteksi dan cegah dini telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, tetapi masih perlu dilembagakan lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada pola komunikasi personal dan figur tertentu.

3.3 Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi berkaitan dengan kesenjangan ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan ekonomi yang mencolok antara komunitas Tolotang dan masyarakat sekitar. Komunitas Tolotang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan usaha penggilingan padi. Keberadaan potensi ekonomi lokal ini menunjukkan bahwa komunitas Tolotang memiliki basis ekonomi yang cukup kuat di tingkat lokal.

Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kerentanan yang perlu diantisipasi. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan regenerasi kader, penguatan kapasitas pendidikan, serta terbatasnya SDM yang mampu menjadi penghubung antara komunitas Tolotang dan birokrasi pemerintahan. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan SDM juga dapat memengaruhi kedalaman analisis, kesinambungan pemantauan, dan kecepatan respons terhadap gejala sosial yang muncul.

Temuan pada dimensi ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi bukan merupakan sumber utama konflik sosial pada komunitas Tolotang. Akan tetapi, aspek ekonomi tetap menjadi bagian penting dari kewaspadaan dini karena kerentanan ekonomi, keterbatasan SDM, dan kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat memengaruhi ketahanan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dimensi ekonomi lebih tepat dipahami sebagai area penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai pemicu utama konflik sosial.

Pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Faktor pendukung utama adalah hubungan sosial yang relatif harmonis antara komunitas Tolotang dan masyarakat sekitar. Hubungan ini membuat potensi konflik dapat diredam melalui kebiasaan komunikasi sosial, hubungan kekeluargaan, dan interaksi sehari-hari. Faktor pendukung berikutnya adalah kuatnya legitimasi tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh lokal memiliki kemampuan menjembatani komunikasi, memberikan klarifikasi, dan meredam isu yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

Sinergi antarlembaga juga menjadi faktor pendukung. Pencegahan konflik sosial tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi ditopang oleh kerja bersama antara Bakesbangpol,

Satpol PP, TNI/Polri, FKUB, KUA, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan komunitas Tolotang memungkinkan informasi mengenai potensi gesekan sosial diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti melalui klarifikasi, dialog, atau mediasi.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan deteksi dan cegah dini meliputi keterbatasan struktur kelembagaan, potensi salah persepsi identitas, ketergantungan pada figur tertentu, dan tantangan sumber daya manusia. Keterbatasan struktur kelembagaan menunjukkan bahwa mekanisme kewaspadaan dini belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Potensi salah persepsi identitas dapat muncul karena kekhasan kepercayaan dan tradisi lokal Tolotang. Ketergantungan pada figur tertentu dapat menjadi kerentanan apabila tidak disertai regenerasi tokoh dan pelembagaan komunikasi. Sementara itu, tantangan SDM memengaruhi kapasitas analisis, pemantauan, dan respons cepat terhadap gejala sosial.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang telah berjalan melalui mekanisme kewaspadaan dini dan koordinasi lintas sektor. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lestari, 2025) yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi unsur penting dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini konflik sosial berbasis agama. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menempatkan komunitas Tolotang sebagai komunitas kepercayaan lokal yang memiliki dinamika sosial khas.

Temuan mengenai pentingnya koordinasi antarlembaga juga sejalan dengan penelitian (Fahmi et al., 2022) yang menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam penelitian ini, koordinasi tidak hanya dipahami pada level kelembagaan provinsi atau kabupaten, tetapi juga pada tingkat lokal melalui keterlibatan TNI/Polri, FKUB, KUA, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini yang efektif memerlukan jembatan antara struktur formal pemerintah dan legitimasi sosial tokoh lokal.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Samudro et al., 2024) mengenai pentingnya pemetaan potensi konflik dan penguatan aktor lokal dalam sistem deteksi dini. Dalam konteks Tolotang, aktor lokal seperti Wa atau Uwak memiliki peran penting karena memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam komunitas. Penelitian ini juga sejalan dengan (Sarasati et al., 2025) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dan komunikasi adaptif dalam sistem peringatan dini, terutama untuk merespons isu sensitif yang dapat berkembang melalui ruang sosial maupun media.

Dari sisi identitas sosial, temuan penelitian ini berkaitan dengan penelitian (Suyono & Lismawati, 2024) yang menjelaskan bahwa stereotip dan identitas sosial dapat membentuk prasangka dan meningkatkan intensi konflik. Pada komunitas Tolotang, potensi salah persepsi identitas tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka, tetapi tetap menjadi gejala sosial yang perlu dipantau.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan sistem kewaspadaan dini juga dipengaruhi oleh pendekatan budaya lokal dan keterlibatan tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Temuan ini memperkuat pendapat (Lederach, 2003) mengenai pentingnya pendekatan transformasi konflik berbasis budaya dan komunitas lokal.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa deteksi dini tidak hanya diarahkan pada konflik yang sudah muncul, tetapi juga pada kerentanan halus yang dapat berkembang apabila tidak dikelola secara tepat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa kondisi harmonis antara komunitas Tolotang dan masyarakat sekitar tidak dapat dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kewaspadaan dini. Sebaliknya, harmoni sosial justru perlu dipelihara melalui sistem yang lebih terstruktur. Ketergantungan pada figur tokoh lokal dapat menjadi kekuatan karena mempercepat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi kelemahan apabila tidak disertai regenerasi dan pelembagaan mekanisme komunikasi yang lebih formal.

Selain itu, penguatan literasi sosial masyarakat dan pengembangan sistem informasi kewaspadaan dini berbasis komunitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan konflik sosial (Minguez Garcia et al., 2024).

Peneliti juga menemukan bahwa isu ekonomi tidak menjadi pemicu utama konflik sosial pada komunitas Tolotang. Potensi ekonomi lokal relatif baik, tetapi keterbatasan sumber daya manusia menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, pencegahan konflik sosial tidak cukup dilakukan melalui pengamanan atau mediasi saja, melainkan juga melalui pemberdayaan, penguatan pendidikan, dan peningkatan kapasitas SDM komunitas agar relasi antara masyarakat dan birokrasi semakin kuat.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi konflik sosial pada komunitas Tolotang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kerangka penyelenggaraan Trantibum telah berjalan melalui mekanisme kewaspadaan dini dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan tersebut tercermin dalam dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Pada dimensi sosial, hubungan antarkelompok relatif harmonis, diskriminasi terbuka rendah, dan akses layanan publik relatif inklusif. Pada dimensi politik, terdapat koordinasi antarlembaga, dukungan kebijakan kewaspadaan dini, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama, serta komunikasi pemerintah dengan komunitas Tolotang. Pada dimensi ekonomi, tidak ditemukan kesenjangan ekonomi yang mencolok, terdapat potensi ekonomi lokal, dan keterbatasan sumber daya manusia teridentifikasi sebagai kerentanan yang perlu diantisipasi.

Meskipun telah berjalan, pelaksanaan deteksi dan cegah dini belum didukung secara optimal oleh kelembagaan kewaspadaan dini, kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan kerentanan sosial yang lebih sistematis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperkuat Tim Kewaspadaan Dini Daerah, membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), melembagakan komunikasi dengan komunitas minoritas, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta melakukan pembinaan sosial yang melibatkan perangkat daerah terkait, aparat keamanan, forum kerukunan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokus yang difokuskan pada Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama Kecamatan Tellu Limpoe dan Kelurahan Amparita. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan lebih menekankan kedalaman pemahaman terhadap proses, aktor, dan dinamika lokal, bukan pengukuran kuantitatif atas tingkat kerawanan konflik.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas lokus pada wilayah lain yang memiliki komunitas kepercayaan lokal atau kelompok minoritas. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan model indeks kewaspadaan dini berbasis indikator sosial, politik, dan ekonomi yang lebih terukur agar dapat digunakan sebagai instrumen praktis oleh pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang, unsur FKUB, TNI/Polri, tokoh adat komunitas Tolotang, tokoh agama, masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, informasi, dukungan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (1994). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Sage Publications, Inc*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4324/9780429469237

Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. *Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Potensi Konflik Di Provinsi Riau. Jurnal Kewarganegaraan, 6(4), 6784–6791.Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(4), 6784–6791.

Kusmana, F. S., Unde, A. A., & Farid, M. (2024). Membangun Jembatan Komunikasi Mulkultural: Penelitian Etnografis di Antara Komunitas Hindu Towani Tolotang dan Muslimdi Sirdap. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, *9*(1), 107–120. http://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/index

Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*.

Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. WordPress.com.

Lestari, N. (2025). *Deteksi Dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama Oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Vol. 3). SAGE Publications, Inc.

Minguez Garcia, B., Saif Alislam Abdulgadir Ahmed, M., Elgadi, E. O., & Elkhalifa, A. A. (2024). Sudan's climate-culture story: a project with HEART – Heritage Empowered Action for Risk in Tuti. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, *14*(5), 793–797. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2024-0053

Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. In *Princeton University Press*. https://doi.org/10.1177/0899764096251009

Rahim, M. A. (2001). Managing Conflict in Organizations. In *Quorum Books*. https://doi.org/10.5040/9798400682117

Samudro, E. G., Sjamsoeddin, S., & Santoso, A. (2024). *Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *1*(1), 11–18.

Sarasati, F., Ramadhan, H., Sianipar, H., & Wahyuti, T. (2025). *Akomodasi Komunikasi dan Rekomendasi Model Early Warning System (EWS) pada Kasus Ujaran Kebencian Berbasis Etnis di Media Sosial*. *6*(April), 1–6.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suyono, H., & Lismawati, L. (2024). Development of a Model for Social Conflict Intentions in Urban Communities as Early Warning Systems. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, *13*(2), 493. https://doi.org/10.12928/jehcp.v13i2.28668

Sweijs, T., Teer, J., Van Hoeve, S., Berti, G., Van Schie, J., Van Der Weerd, J., & Michaelis, J. (2022). Practices, Principles and Promises of Conflict Early Warning Systems-Annex.

In *The Hague Centre for Strategic Studies* (Issue February). https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/avoiding-bloodbath-ethiopias-mekelle.

Syukur, N. A. (2021). Kepercayaan Tolotang dalam perspektif masyarakat bugis sidrap. *Jurnal Rihlah, III*(01), 109.